

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penemuan teknologi pemisahan atom menjadi nuklir menjadi sumber inspirasi dan juga kekhawatiran, karena penemuan teknologi nuklir di satu sisi dapat memberikan solusi ke banyak negara untuk dijadikan sumber energi, namun disisi lain teknologi nuklir juga dapat dijadikan sebagai senjata nuklir yang sangat mematikan. Pada awal tahun 1960, usaha-usaha penelitian untuk penerapan energi nuklir yang dasarnya mempunyai tujuan damai telah membawa kemajuan dalam bidang teknologi reaktor nuklir sebagai pembangkit tenaga listrik. Reaktor nuklir tidak hanya dapat memproduksi tenaga listrik, tetapi juga menghasilkan plutonium, suatu material yang secara kimiawi dapat dipisahkan dan digunakan dalam pembuatan senjata nuklir.

Jika ancaman penyimpangan penyelenggaraan material nuklir dari tujuan damai tidak dicegah oleh rejim internasional non proliferasi, maka semakin banyak negara yang akan memiliki senjata nuklir. Bukan tidak mungkin akan rentan terhadap risiko terjadinya perang nuklir, sehingga terjadi peningkatan konflik dalam suatu kawasan. Hal tersebut berarti bahwa pemilikan senjata nuklir pada banyak negara hanya akan menambah dimensi ancaman terhadap keamanan dan perdamaian dunia.¹

¹ *The United Nations and Nuclear Non-Proliferation*, The United Nations Blue Book Series, Volume III, Department of Public Information, New York, 1995. Hlm.3.

Menurut mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger, setidaknya ada tiga alasan yang mendorong beberapa negara untuk menggunakan senjata nuklir.² *Pertama*, keinginan untuk menjadi salah satu kekuatan dunia. Dimana, negara harus mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kedaulatannya dari berbagai ancaman sebagai sebuah identifikasi negara super power. Dan India termasuk di dalam katagori tersebut.. *Kedua*, negara yang merasa terancam oleh negara tetangga dengan populasi atau sumberdaya yang lebih besar, dapat dilihat dari peralatan senjata nuklir, bersikap tidak dapat menerima resiko atau membuat alat pencegahan melawan berbagai ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka. Israel dan Pakistan termasuk dalam kategori ini. *Ketiga*, adalah negara-negara yang tekun merusak keseimbangan kekuatan di kawasan mereka dan melihat persenjataan nuklir sebagai sebuah alat untuk mengintimidasi tetangga mereka sebagai bentuk intervensi dari luar untuk mengecilkan hati. Irak dan Korea Utara termasuk dalam kategori ini.

Untuk mencegah penyebaran dan pengembangan senjata nuklir, maka disusunlah perjanjian kerjasama *Internasional Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) yang bertujuan untuk mencegah penyebaran dan mencegah peningkatan jumlah nuklir di dunia, karena dikhawatirkan apabila senjata ini di salah gunakan dan bukan untuk tujuan damai.

² "India Dapat Pas Jalan Nuklir", *Bisnis Indonesia*, 6 Maret 2006.

Dorongan di balik NPT adalah keprihatinan untuk keselamatan dunia dengan banyaknya negara yang memiliki senjata nuklir. Banyaknya negara yang memiliki senjata nuklir akan mengurangi keamanan bagi semua, memperbesar resiko kesalahan perhitungan, kecelakaan, penggunaan senjata yang tidak sah, atau dari peningkatan ketegangan, konflik nuklir. *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir) adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 dan mulai berlaku pada tahun 1970 yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata, untuk mempromosikan kerjasama dalam penggunaan energi nuklir damai dan untuk lebih mencapai tujuan dalam melakukan perlucutan senjata nuklir dan perlucutan senjata secara umum dan lengkap.³

Pada tanggal 11 Mei 1995, perjanjian ini diperpanjang tanpa batas. Sebanyak 190 negara telah bergabung dalam perjanjian ini, termasuk 5 negara yang memiliki senjata nuklir: Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis dan Cina (juga 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB). Banyak negara telah meratifikasi NPT daripada perjanjian pembatasan dan perlucutan senjata-senjata yang lain, yang merupakan bukti bagaimana pentingnya perjanjian itu.⁴ Perjanjian ini ditinjau setiap 5 tahun dalam pertemuan-pertemuan yang disebut *Review Conference of The Parties to The Treaty of Non-Proliferation of Nuclear Weapons*. NPT secara umum digambarkan memiliki tiga "pilar" utama: non-proliferasi, perlucutan senjata dan penggunaan secara damai.

³ "Nuclear Non Proliferation Treaty," dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_NonProliferation_Treaty, diakses Tanggal 1 Maret 2012.

⁴ "Nuclear," dalam <http://www.un.org/Disarmament/WMD/Nuclear/NPT.shtml>, diakses Tanggal 1 Maret 2012.

Namun negara-negara yang menandatangani perjanjian tersebut tidak konsisten. Seperti misalnya Amerika Serikat, sebagai salah satu negara peratifikasi NPT, Amerika Serikat malah mendominasi perjanjian tersebut dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan nuklir kepada beberapa negara non-nuklir seperti terhadap India dan Irak, dan bahkan tidak ada pihak lain yang dapat mencegah bentuk dominasi kebijakan Amerika Serikat terhadap kedua negara tersebut.

Menurut laporan tahunan Institut Riset Perdamaian *Internasional Stockholm* (SIPRI) pada awal tahun 2007 ada lima negara pemilik senjata nuklir yang diakui oleh Perjanjian Non Proliferasi Nuklir (NPT), yaitu AS, Rusia, Cina, Inggris dan Perancis yang totalnya mencapai lebih dari 26.000 hulu ledak nuklir, dan termasuk didalamnya ada senjata pengirim dan suku cadangnya, baik dalam penyimpanan aktif maupun tidak aktif. Kelima negara tersebut, kecuali Inggris, mempunyai program modernisasi senjata nuklir yang sedang dilaksanakan. Sedangkan, Inggris menggantikan armada kapal selam Trident-nya dengan kapal-kapal selam terbaru yang mampu membawa senjata nuklir. Teknologi ini juga diikuti oleh India dan Pakistan serta Israel yang memiliki senjata nuklir namun tidak menjadi anggota dari NPT, dengan terus mengembangkan sistem peluru kendali baru yang mampu membawa hulu ledak nuklir.

Saat ini, Rusia dan Amerika Serikat telah mengumumkan jumlah kelebihan HEU dari total keseluruhan kebutuhan militernya, sekitar 285 ton HEU Rusia dan 92 ton HEU Amerika Serikat dari hulu-hulu ledak yang tidak digunakan lagi telah diolah kembali dan dijual untuk penggunaan reaktor nuklir sipil Amerika Serikat.

Namun demikian, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat memiliki stok HEU dalam jumlah besar yang bisa dibuat menjadi senjata di masa yang akan datang. Bahkan Amerika Serikat telah mengumumkan bahwa cadangan HEU milik angkatan lautnya dalam jumlah yang cukup untuk membuat sekitar 5.000 hulu ledak nuklir.⁵ Amerika Serikat adalah negara pertama yang membuat bom atom, dan satu-satunya negara yang telah menggunakan bom tersebut dalam perang. Gambaran di atas juga memperlihatkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan masyarakat dunia untuk mengurangi dan mencegah penyebaran senjata nuklir telah gagal.

Namun, sikap Amerika Serikat pada akhirnya tidak memperdulikan perjanjian yang telah disepakatinya, dimana India merupakan negara yang tidak meratifikasi perjanjian NPT. Program nuklir di India tidak sesuai dengan tujuan pemeberdayaan nuklir sebagai sebuah upaya pencapaian perdamaian. Nampak sekali ambiguitas sikap Amerika Serikat terhadap isu nuklir, dimana terdapat standar ganda yang dimiliki Amerika Serikat. Contoh realnya adalah Amerika mendukung pengembangan nuklir di India, negara yang tidak meratifikasi NPT, namun tidak mendukung Iran.

Di awal tahun 2007 adalah babak baru persetujuan antara Amerika Serikat dengan Iran telah dimulai. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dimotori Amerika Serikat secara aklamasi mulai menerapkan sanksi bagi Iran yang berisi larangan perdagangan material nuklir. Sanksi tersebut diambil setelah Iran menolak untuk menghentikan program pengayaan uranium yang

⁵ "Dunia Semakin Penuh Senjata", *Kompas*, 25 Juni 2007.

dicurigai Barat, khususnya Amerika Serikat, untuk mengembangkan persenjataan nuklir.⁶

Menanggapi sanksi Dewan Keamanan PBB tersebut, Pemerintah Iran kembali menyatakan bahwa program nuklirnya hanyalah untuk kepentingan sipil. Lebih lanjut, Iran kembali mengulangi ancamannya akan menggunakan senjata apapun untuk mempertahankan diri, termasuk ekspor minyak, sebagai senjata dalam menghadapi tekanan internasional terhadap program nuklir Iran. Sudah barang tentu setelah ancaman ini benar-benar dipraktekkan Iran, maka harga minyak mentah di pasaran dunia meningkat dan berbagai transaksi perdagangan internasional akan ikut juga terganggu. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Robert Gates menyatakan bahwa kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat di Teluk Persia akan ditingkatkan. Gates secara eksplisit menyatakan bahwa jumlah tentara Amerika Serikat di Irak saja diperkirakan akan bertambah mendekati sekitar 140.000 personel. Menurut Amerika Serikat, peningkatan militer tersebut merupakan bagian dari strategi global perang melawan terorisme dalam jangka waktu yang lama dan merupakan pesan pada kawasan, khususnya bagi Iran dan Suriah, bahwa cengkeraman militer Amerika Serikat akan makin kuat di kawasan Timur Tengah, khususnya Teluk Persia. Sikap yang ditunjukkan Amerika Serikat terhadap Iran tersebut sangat kontras dengan sikapnya terhadap India.

⁶ "Sekitar Krisis Nuklir Iran," dalam http://www.unpad/sekitar_krisis_nuklir_irann.pdf, diakses tanggal 20 Juni 2012.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Robert Gates juga memberikan pernyataan secara terbuka bahwa “kami tidak ingin Iran mengembangkan nuklir di negaranya karena dapat membuat senjata yang berbahaya, namun di India akan kami dukung karena India mengembangkannya untuk sipil.” Pernyataan tersebut jelas sekali merupakan wujud ambiguitas dari Amerika Serikat berkaitan dengan isu nuklir.

Selama ini Amerika Serikat menuduh Iran memiliki hubungan dengan beberapa organisasi teroris internasional, kelompok garis keras Islam (Hamas dan Jihad Islam), serta kelompok perlawanan Syiah di Irak, seperti Moqtada Al Sadr dengan tentara Mahdi-nya. Adanya indikasi link antara kelompok Moqtada Al Sadr dengan Iran juga dikemukakan oleh Smith Al Hadar. Apabila Iran dibiarkan menguasai senjata nuklir, dikhawatirkan teknologi tersebut akan didistribusikan pula kepada kelompok-kelompok tersebut.⁷

India adalah negara yang sedang mengembangkan program nuklir., namun India mendapatkan perlakuan yang berbeda dari Amerika Serikat yang mengaku sebagai “polisi dunia” padahal pengembangan nuklir ini telah diatur oleh perjanjian NPT yang bertujuan untuk membatasi atau mencegah penyebaran nuklir. Sebagai negara yang berjulukan “polisi dunia” Amerika Serikat sebelumnya malah mempunyai kebijakan mendukung program nuklir India bahkan Amerika Serikat juga memberi jalan bagi negara India untuk melakukan transfer energi dengannya.

⁷ "Situasi dalam Negeri Irak: Terus Memburuk?", dalam <http://www.rsi.sg/indonesian/fokusasia/view/20070123173500/1/.htm>, diakses tanggal 20 Juni 2012.

Pada tahun 1966, India menyatakan bahwa negaranya mampu memproduksi senjata nuklir dalam waktu 18 bulan. Di tahun 1974, India melakukan uji coba nuklir sampai dengan 15 kiloton dan menyatakan bahwa tes tersebut merupakan “ledakan nuklir yang damai”. Pada bulan Mei 1998, India mengejutkan dunia ketika melakukan 6 uji coba nuklir yang dilakukan di bawah tanah di daerah Pokharan dan Rajasthan dan juga sekaligus menyatakan bahwa negaranya sebagai negara nuklir (*nuclear state*).

Banyak negara yang pada akhirnya mengkhawatirkan dukungan Amerika Serikat terhadap nuklir India. Hal ini dikarenakan India adalah negara sering konflik dengan Pakistan. Pakistan juga adalah negara yang disinyalir memiliki nuklir dan mendapat dukungan dari Cina serta Rusia. Kepemilikan India terhadap nuklir dikhawatirkan dapat menstimulus penggunaan nuklir apabila India dan Pakistan mengalami konflik.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Robert Gates, menjelaskan bahwa Amerika Serikat percaya bahwa India mampu menggunakan nuklir untuk kepentingan sipil dengan baik. Menurut Gates, Amerika Serikat akan mendukung perkembangan nuklir di India dan secara jelas membuat kesepakatan dengan India berkaitan dengan nuklir. Kesepakatan tersebut merupakan wujud nyata dari ambiguitas Amerika Serikat terhadap isu nuklir.⁸ Di satu sisi Amerika Serikat menentang negara lain untuk mengembangkan nuklir, namun di sisi lain Amerika Serikat mendukung perkembangan nuklir di negara tertentu.

⁸ “Detail Tiga Kekuatan Militer Dunia,” dalam http://www.indonesianvoices.com/index.php?option=com_content&view=article&id=161:detail-tiga-kekuatan-militer-dunia&catid=1:latest-news, diakses tanggal 20 Juni 2012.

Amerika Serikat seakan menjadikan India negara yang spesial karena dapat bebas menggunakan nuklir di negaranya, sementara negara lain hingga saat ini tidak ada yang berani mengambil langkah tegas untuk menegur Amerika Serikat. Bahkan PBB seakan juga tidak mampu menjalankan fungsinya untuk memberikan sanksi kepada India maupun Amerika Serikat atas dukungan kepada India.

Pada awalnya India tidak memiliki kedekatan dengan Amerika namun dengan Cina dan Rusia. Kedekatan Cina dan Rusia terhadap India diminimalisir oleh Amerika. *People's Republic of China* atau yang biasa dikenal dengan Republik Rakyat Cina (RRC) dan sering disingkat Cina merupakan negara terbesar keempat di dunia setelah Rusia, Kanada, dan Amerika Serikat. Dasar dikatakannya Cina sebagai negara terbesar keempat karena perekonomi Cina yang mapan, terlihat dari pendapatan tahunan rata-rata Cina sebesar \$1.300.⁹

Cina mengejutkan dunia dengan perekonomiannya. Perjalanan perekonomian Cina telah membawa status Cina sebagai negara maju dimana sebelumnya Cina hanyalah sebuah negara miskin dengan populasi terbesar di dunia. Kenaikan status Cina ini didukung oleh sebuah teori yang digolongkan dalam jalur "*International Structuralist*" yaitu teori sistem dunia yang dikemukakan oleh Immanuel Wallerstein, seorang tokoh pembangunan dan ilmuwan yang berada di jalur sosiologi histories.¹⁰

Pemikiran mengenai "*World Capitalism*" sangat relevan dengan kemajuan ekonomi Cina karena Cina yang selama ini ditakuti dengan paham komunisnya, kini dalam perekonomiannya telah beralih ke jalur kapitalis. Untuk memahami

⁹ Wibowo, *Belajar dari Cina: Bagaimana Cina Merebut Peluang dalam Era globalisasi*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2004, Hal.11.

¹⁰ *Ibid.* Hal.12.

lebih lanjut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pertumbuhan Perekonomian Cina dalam Perspektif Teori Sistem Dunia”.

Liberalisasi di Cina dilakukan untuk meningkatkan ekonomi Cina. Adanya liberalisasi membuat setiap masyarakat Cina berupaya keras membangun ekonominya dengan melakukan berbagai bisnis. Cina adalah tempat kerja dunia karena negara tersebut terletak di bagian dunia yang relative stabil dan menawarkan kepada produsen-produsen dunia, tenaga kerja yang andal, patuh, dan mampu, yang dipertahankan melalui disiplin yang dilaksanakan pemerintah.¹¹ Produk Cina banyak beredar di dunia termasuk di India. Rusia juga merupakan negara yang bangkit pasca runtuhnya Uni Soviet. Kemampuan Rusia dalam menyediakan persenjataan membuat negara tersebut memiliki kedekatan dengan India.

B. Pokok Permasalahan

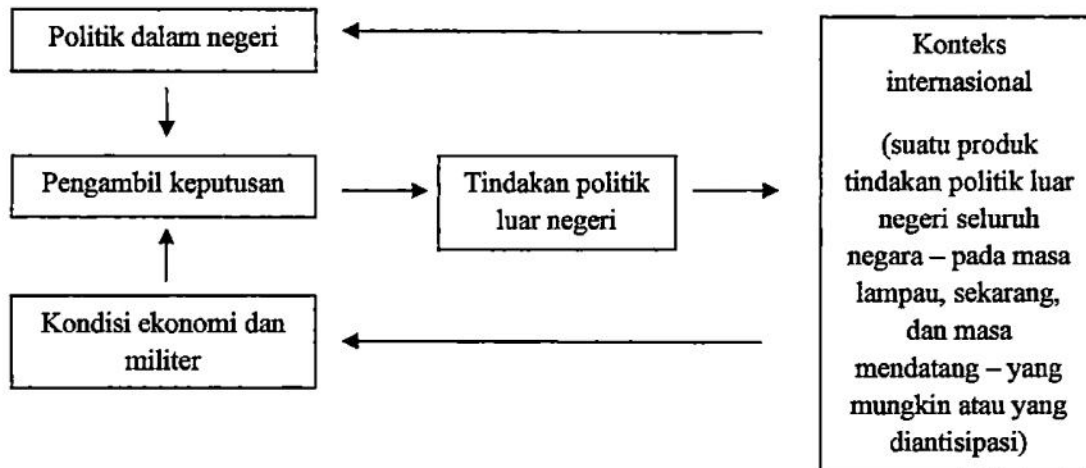
Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan ini maka penulis menarik sebuah pokok permasalahan sebagai berikut: “Mengapa Amerika Serikat mendukung pengembangan nuklir India, meskipun India bukan negara penandatangan perjanjian non-proliferasi nuklir (nuclear non-prolifertion treaty/NPT)?”.

¹¹ Ted C. Fishmen, *Bagaimana Kedigdayaan China Menantang Amerika dan Dunia*, Gramedia, Jakarta, 2006, Hal.15.

C. Kerangka Teori

1. Teori Politik Luar Negeri

Untuk menjelaskan permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan teori politik luar negeri yang disampaikan William D.Coplin dalam bukunya “Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoretis”. Menurut William D. Coplin, tindakan politik luar negeri tertentu mungkin bisa dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri. Pertama, kondisi politik dalam negeri mengambil keputusan politik luar negeri; kedua, kemampuan ekonomi dan militer; dan ketiga, konteks internasional, yaitu posisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem itu. Gambar 1 mengilustrasikan bagaimana faktor-faktor yang disebutkan tadi berinteraksi untuk menghasilkan tindakan politik luar negeri.



Gambar 1.1

Interaksi dalam Tindakan Politik Luar Negeri¹²

¹² Coplin, Marsedes Marbun, *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoretis*, hal.30.

Coplin juga menjelaskan tentang hubungan antara para pengambil keputusan politik luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri, yang berupaya untuk mempengaruhi perilaku politik luar negeri mereka, yang disebut dengan *policy influencers*. Dan hubungan antara aktor-aktor politik dalam negeri tadi dengan para pengambil keputusan politik luar negeri yang disebut dengan *policy influence system*.

Dalam bukunya, Coplin menjelaskan bagaimana faktor-faktor ekonomi dan militer saling berkaitan sekali dengan pembentukan politik luar negeri suatu negara. Dikatakan bahwa terdapat dua dimensi yang relevan dengan penyusunan politik luar negeri, yaitu kapasitas produksi ekonomi dan kebergantungan ekonomi pada perdagangan dan finansial internasional. Dari segi militer, Coplin mengatakan kekuatan militer suatu negara tidak hanya bergantung pada jumlah personal, tingkat pelatihan dan perlengkapannya, tetapi juga bergantung pada tingkat dukungan luar negeri serta peran angkatan bersenjata dalam memelihara stabilitas dalam negeri. Dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi dan militer suatu negara dapat menjadi alat politik negerinya. Keunggulan ekonomi dan militer tidak dengan sendirinya menyajikan alat, yang pada umumnya kuat dalam mencapai sasaran politik luar negeri bagi para pengambil keputusan politik luar negeri.

2. Teori Pembendungan

Teori pembendungan (*containment policy*) merupakan teori yang muncul di Amerika Serikat sejak perang dingin. Pertama kali teori ini digunakan oleh George F. Kennan pada tahun 1947. Teori pembendungan menggunakan strategi

dengan cara mencegah meluasnya pengaruh komunisme. Sebagai komponen dari perang dingin, teori pembendungan merupakan respon dari keberadaan Uni Soviet yang saat itu berusaha untuk memperluas pengaruh komunisnya di wilayah Eropa bagian Timur, Cina, Korea dan Vietnam.

Contoh dari penerapan teori ini adalah di Asia Tenggara, jika komunisme tidak dibendung maka dapat mempengaruhi wilayah Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Laos, Kamboja, dan Thailand menjadi Negara komunis. Pada tahun 1917 terdapat revolusi komunis di Rusia, yang pada akhirnya membuat para pemimpin barat melakukan isolasi terhadap negara tersebut yang terus mempromosikan komunisme pada negara lain. Pada Maret 1919, Perdana Menteri Perancis meminta untuk membentuk penjagaan atau lingkaran bagi negara non komunis untuk menentang Soviet. Menanggapi hal tersebut, maka President Woodrow Wilson melakukan karantina terhadap komunis. Dipahami bahwa sejak Perang Dunia II, Amerika dan Uni Soviet merupakan dua Negara besar yang saling bertentangan (1944–1947).

Strategi kebijakan dilakukan Amerika untuk membendung pengaruh Soviet yang terus mengembangkan komunisme ke negara lain. Teori pembendungan merupakan inisiatif dari President Harry S. Truman pada tahun 1947 sebagai respon dari Inggris untuk mendukung perekonomian Yunani dan Turki. Pada 12 Maret 1947 dalam kongres, Truman mengajarkan tentang teori pembendungan (*containment policy*), yang menjelaskan bahwa Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk membantu negara-negara menjadi negara yang merdeka. Pernyataannya sebagai berikut:

*"At the present moment in world history nearly every nation must chose between alternate ways of life. The choice is too often not a free one. One way of life is based upon the will of the majority, and is distinguished by free institutions, representative government, free elections, guaranties of individual liberty, freedom of speech and religion, and freedom from political oppression.."*¹³

Truman mengemukakan bahwa keberadaan komunis dapat membahayakan Negara lain. Selain itu dikemukakan bahwa Amerika merupakan Negara yang dianggap mampu melakukan pembendungan terhadap pengaruh meluasnya komunis. Pada kasus yang diangkat penulis, *policy influencers* yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Amerika mendukung program nuklir di India, yang merupakan salah satu dari empat kategori *policy influencers*, yaitu partisan, birokratis, kepentingan dan *mass influencers*.

Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan, bahkan setiap politik luar negeri perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai kepentingan nasional itu.

Model aktor rasional, model ini sangat terkenal terutama karena asumsi rasionalitas yang dikandungnya. Dalam model itu para pembuat keputusan itu dianggap rasional dan kita umumnya memang cenderung berfikir bahwa keputusan (terutama yang menyangkut politik luar negeri) dibuat secara rasional.

¹³ "The Internet Encyclopedia of International Relations," dalam <http://www.towson.edu/polsci/irencyc/T9840238/test.htm>, diakses tanggal 5 Desember 2012.

Karena itulah, menurut Allison, model ini paling sering diterapkan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan politik luar negeri. Untuk menganalisis dan menjelaskan mengapa para pembuat keputusan di negeri lain itu melakukan sesuatu, cara paling mudah adalah berasumsi bahwa para pembuat keputusan adalah rasional dan kemudian menempatkan diri dalam posisi para pembuat keputusan tersebut. Pada keadaan ini maka dapat mencoba untuk mengetahui apa kira-kira tujuannya dengan melakukan tindakan tertentu itu. Artinya, dapat juga berasumsi bahwa pemerintah negara lain itu monolit, tidak terpecah belah, dan bahwa kejadian penting pasti disebabkan oleh sesuatu yang penting juga.¹⁶

Pada skripsi ini yang menjadi aktor utama adalah Amerika Serikat sendiri yang mendukung program nuklir India. Keinginan Amerika Serikat mendukung program nuklir India dikarenakan adanya keuntungan yang diperoleh dibidang ekonomi dan militer. Keuntungan secara ekonomi dan militer Amerika Serikat dalam mendukung program nuklir India adalah ketika Rusia tidak lagi menjadi pemasok persenjataan India maka produk-produk militer Amerika Serikat masuk ke bursa penjualan senjata di India, maka Amerika Serikat akan berusaha memonopoli bisnis jutaan dolar itu. Apabila tidak terpaksa, politik unilateral Amerika Serikat tidak pernah bisa menerima partner dalam bentuk apa pun.¹⁷

Disisi lain kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mendukung program nuklir India tidak berkesesuaian dengan Perjajian NPT yang telah disepakati oleh Amerika Serikat. Padahal menolak kesepakatan NPT. Amerika Serikat bahkan

¹⁶ Graham T, Allison, *Essence of Decision* (Little, Brown, 1971); "Conceptual Model and the Cuban Missile Crisis," hal.24.

¹⁷ "Dampak Kesepakatan Nuklir Amerika dan India," dalam <http://Indonesia.irib.ir/telistik/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2012.

mengembangkan kemampuan nuklir dan peluru kendali India. Langkah ini diambil agar Amerika Serikat dapat memanfaatkan posisi India sebagai saingan utama melawan Cina, meski hubungannya dengan Pakistan terpaksa harus dipertaruhkan. Amerika Serikat berharap mampu merangkul partai berkuasa di India melalui perjanjian kerjasama nuklir, dan menghadapkan India dengan Pakistan.¹⁸

Di Amerika, sejumlah anggota DPR dan Senat Amerika mengancam bahwa kesepakatan ini akan disetujui bila India menentang program damai nuklir Iran. Para pejabat tinggi Amerika tidak mengeluarkan pernyataan apapun terkait masalah ini. Namun, diamnya mereka atau mengeluarkan pernyataan yang memiliki dua makna menunjukkan sikap mereka sama dengan anggota DPR dan Senat. Ancaman sejumlah anggota DPR dan Senat Amerika itu membuahkan hasil ketika India positif mendukung pelimpahan agenda nuklir Iran ke Dewan Keamanan (DK) PBB.¹⁹ selain itu motif dari Amerika Serikat terhadap program nuklir India akan membantu mempererat kerjasama antara India dan Amerika Serikat dalam bidang energi. India merupakan negara dengan konsumen energi terbesar kelima di dunia. Pemenuhan energi India pada awalnya 70% bergantung pada bahan bakar fosil.

Dengan membuat reaktor nuklir dan Amerika Serikat yang berperan sebagai fasilitator yang menganjurkan bagaimana menggunakan nuklir dengan baik dan

¹⁸ "Krisis Nuklir Internasional dan Energi Nuklir Iran," dalam <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/07/27/krisis-nuklir-internasional-dan-energi-nuklir-di-iran/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2012.

¹⁹ "Dampak Kesepakatan Nuklir Amerika dan India," dalam http://indonesian.tribune.com/asset_publisher/k0Z8/content/dampak-kesepakatan-nuklir-amerika-dan-india-1, diakses pada tanggal 18 Maret 2012.

diharapkan membuat hubungan kedua belah negara menjadi harmonis. Melalui kerjasama ini akan membuka peluang pasar baru yang penting bagi ekonomi Amerika Serikat dengan melakukan investasi dalam industri nuklir India. Amerika Serikat dapat membuka pasar baru bagi ekspor bahan bakar nuklir ke India, sehingga meningkatkan hubungan ekspor dan impor antara kedua negara.

Dukungan Amerika Serikat terhadap India juga tidak terlepas dari untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh ekonomi dan politik Cina. Cina merupakan negara yang saat ini menjadi pesaing Amerika Serikat di bidang ekonomi dan politik. Di bidang ekonomi, produk-produk Cina banyak diminati oleh masyarakat dunia sedangkan dibidang politik banyak negara yang bekerjasama dengan Cina dan pengaruh Cina terhadap perpolitikan internasional juga luas. Hal ini apabila tidak diantisipasi tentu saja akan sangat merugikan Amerika Serikat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa adanya keuntungan dalam bidang ekonomi dan politik yang diperoleh Amerika Serikat dalam upayanya mendukung program nuklir India inilah yang membuat politik luar negeri Amerika Serikat menjadi pro india. Amerika Serikat ingin menandingi meluasnya pengaruh politik dan ekonomi Cina dan Rusia di India. Tanpa adanya upaya untuk membendung pengaruh Cina dan Rusia di India maka pengaruh kedua Negara tersebut akan semakin meluas dan dapat membahayakan posisi Amerika Serikat yang selama ini dianggap sebagai negara yang paling memiliki pengaruh luas.

Faktor yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap program nuklir India adalah adanya upaya Amerika Serikat untuk membendung meluasnya pengaruh politik dan ekonomi Cina serta Rusia di India.

E. Jangkauan Penelitian

Sebagai sebuah usaha untuk menghindar dari penulisan ilmiah yang terlampau luas dan tidak terarah, sehingga akan mengaburkan isi dan topik pembahasan, maka di perlukan pembatasan. Upaya pembatasan masalah tersebut dimaksudkan agar penulis tetap terfokus pada masalah yang diteliti sehingga akan mempermudah dalam pengumpulan dan penelitian data. Selain itu, penyempitan masalah yang akan di kaji juga bertujuan untuk membuat penulis maupun pembaca tidak melenceng jauh dari apa yang akan dan telah dikaji.

Jadi, penulis memberi batasan pada skripsi ini dimulai dari adanya *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir) adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada 1 Juli 1968 dan mulai berlaku pada tahun 1970 sampai adanya upaya Amerika Serikat dalam mendukung program nuklir India.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen yang dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder yang dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dari literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan pertimbangan:

diwakili oleh informasi-informasi dari literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan pertimbangan:

1. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan yang meliputi literature yang relevan, surat kabar dan internet.
2. Tujuan penelitian ini bersifat eksplanatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, dimana, kapan atau berapa yang berwujud pada menganalisa dari fakta-fakta yang terkumpul, yang didapat melalui data kualitatif.

G. Sistematik Penulisan

Bab pertama, menguraikan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas mengenai politik luar negeri Amerika Serikat terhadap isu nuklir.

Bab ketiga, membahas mengenai perkembangan program nuklir di India serta bentuk apa saja yang menjadi dukungan Amerika Serikat terhadap perkembangan nuklir di India.

Pada bab IV membahas tentang upaya Amerika Serikat untuk menandingi meluasnya pengaruh politik dan ekonomi Cina dan Rusia di India.

Bab terakhir ini akan menguraikan kesimpulan mengenai hasil analisa pembahasan permasalahan berdasarkan data yang didapat.